

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGELOLAAN PASAR MODERN OLEH PERUSAHAAN DAERAH  
ROKAN HULU JAYA DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN  
ROKAN HULU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**MARDIL HAJAR**

**NPM : 157310506**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Mardil Hajar  
Npm : 157310506  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Pasar Modern Oleh  
Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya di  
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan  
Hulu

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah di pelajari dan di nilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di uji dalam sidang komprehensif.

Pekanbaru, Januari 2020  
Pebimbing I  
Pebimbing II

Dr.H. Syafhendry,M.Si  
Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos.,M.Si

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

Budi Mulianto, S.IP.,M.Si


UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

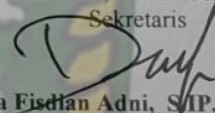
Nama : Mardil Hajar  
NPM : 157310506  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Pasar Modern Oleh Perusahaan Daerah  
Rokan Hulu Jaya Di Kecamatan Rambah Kabupaten  
Rokan Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.


Ketua

  
Dr. Zainal, S.Sos., M.Si


Pekanbaru, Desember 2020  
Sekretaris

  
Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

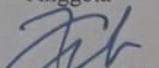
Anggota

  
Dr. H. Syafhendry, M.Si

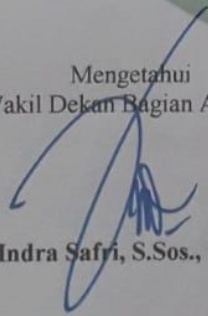
Anggota

  
Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si

Anggota

  
Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA

Mengetahui  
Wakil Dekan Bagian Akademik

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : /UIR-FS/KPTS/2020**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- Nama : Mardil Hajar  
N P M : 157310506  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : PEngelolaan Pasar Modern oleh PERusahaan daerah Rokan Hulu Jaya Kecamatan rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Struktur Tim :
- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.        | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.  | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. H. Syafhendry., M.Si.        | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 5. Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA         | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 01 April 2020  
Dekan,

  
**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

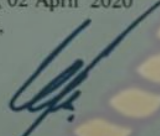
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 01 April 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 02 April jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa.

Nama : Mardil Hajar  
NPM : 157310506  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Pasar Modern oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.  
Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Aadni, S.IP., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. Syaahendry., M.Si.	Anggota	3.
4.	Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si.	Anggota	4. 
5.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA	Anggota	5. 

Pekanbaru, 02 April 2020  
An. Dekan,

  
**Dr. H. Panca Setvo Prihatin, S.IP., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mardil Hajar  
NPM : 157310506  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Pasar Modern Oleh Perusahaan Daerah  
Rokan Hulu Jaya Di Kecamatan Rambah Kabupaten  
Rokan Hulu

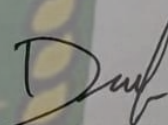
Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, Desember 2020  
An. Tim Penguji  
Sekretaris

Ketua



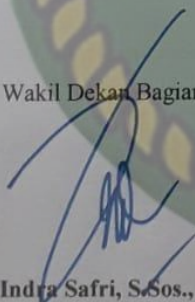
Dr. Zainal, S.Sos., M.Si



Dita Firdian Adni, S.IP., M.IP

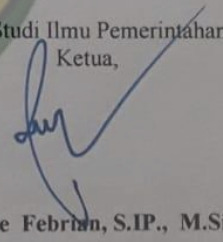
Turut Menyetujui,

Wakil Dekan Bagian Akademik



Indira Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrina, S.IP., M.Si

**PENGELOLAAN PASAR MODERN OLEH PERUSAHAAN DAERAH  
ROKAN HULU JAYA DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN  
ROKAN HULU**

**ABSTRAK**

**MARDIL HAJAR**

Pasar merupakan tempat berlangsungnya hubungan intraksi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dimana dua pihak atau lebih terlibat dalam kesepakatan kegiatan jual beli baik barang dan jasa atau produk. Pasar Modern Pasir Pengaraian merupakan salah satu Pasar Tradisional yang sekarang sudah berkembang menjadi Pasar Modern yang dibangun dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya yang berlokasi di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, mendeskripsikan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pengelolaan. Penelitian menggunakan Metodologi Deskriptif Kualitatif. Fokus penelitian yang ditetapkan adalah Pengelolaan Pasar Modern Oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, yang terdiri atas Pengelolaan dalam Perencanaan Pengorganisasian dan Pengendalian serta hambatan-hambatannya. Informan penelitian adalah Direktur Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, Pedagang Pasar Modern dan Pengunjung di Pasar Modern. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Pasar Modern dalam Perencanaan, Pengorganisasian, Pengendalian dalam pengelolaan Pasar Modern belum berjalan dengan baik dan efektif karena masih banyak dalam penempatan pedagang belum sesuai dengan hasil yang diharapkan diantaranya ada hambatan-hambatan dalam penentuan klasifikasi tempat di Pasar Modern adalah kurangnya dana atau anggaran dari Pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan dilantai 3 sehingga tempat yang ingin di tentukan belum bisa sesuai dengan keinginan pedagang dan belum sesuai dengan rencana Perusahaan Daerah. Selain itu faktor penghambat yang ditemukan melalui wawancara untuk menentukan klasifikasi tempat para pedagang yaitu kurang baiknya Komunikasi antara pedagang dan karyawan sehingga usulan dari pedagang yang mengusulkan agar sesuai dengan penempatan tempat yang di inginkan belum terpenuhi atau terlaksanakan.

**Kata Kunci : Pengelolaan, Pasar Modern, *Institusi*.**

## **MODERN MARKET MANAGEMENT BY ROKAN HULU JAYA REGIONAL COMPANY IN RAMBAH DISTRICT ROKAN HULU DISTRICT**

### **ABSTRACT**

MARDIL HAJAR

The market is a place where social, cultural, and economic interactions take place in which two or more parties are involved in the sale and purchase of goods and services or products. Pasir Pengaraian Modern Market is one of the traditional markets which has now developed into a modern market which was built and managed by the Rokan Hulu Jaya Regional Company which is located in Rambah District, Rokan Hulu Regency. The purpose of this study is to identify, analyze, describe, and identify management factors. This research uses a qualitative descriptive methodology. The research focus that was determined was Management of Modern Markets by the Regional Company of Rokan Hulu Jaya, which consisted of Management in Organizational Planning and Control and its obstacles. The research informants were the Director of the Rokan Hulu Jaya Regional Company, Modern Market Traders and Visitors to Modern Markets. While the data collection technique is done by means of observation, interviews and documentation. The results showed that Modern Market Management in Planning, Organizing, Control in Modern Market management has not been going well and effectively because there are still many traders in placing the traders not in accordance with the expected results, including obstacles in determining the classification of places in the Modern Market. funds or budget from the Government to complete the construction on the 3rd floor so that the place to be determined cannot be in accordance with the wishes of the traders and is not in accordance with the plan of the Regional Company. In addition, the inhibiting factor that was found through interviews to determine the classification of the places of traders, namely the lack of good communication between traders and employees, so that the suggestions from the traders who proposed to match the desired placement of places were not fulfilled or implemented.

***Keywords: Management, Modern Market, Institutions.***



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobilalamin dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Pasar Modern Oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”, tanpa halangan satupun dan menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Shalawat serta salam tidak lupa pula dihadiahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan segala jiwa dan raganya demi tegaknya khalimatul haq di jagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa kita umat manusia dari zaman jahiliah (kebodohan) ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Terimakasih tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. H Syafrinaldi, S H, MCL
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dan menimba ilmu di fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si selaku ketua prodi ilmu pemerintahan fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr, H. Syafhendry., M.Si selaku dosen pembimbing I (satu) atas ketulusan hati dan dengan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Hj. Rosmayani S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Semua Bapak dan Ibuk Dosen fakultas ilmu social dan ilmu politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
7. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang sangat besar kepada ayah dan ibunda tercinta, beserta seluruh keluarga besar, atas segala dukungan dan do'a restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya bagipenulis.
8. Terimakasih kepada abang kita yaitu Almi S.IP dan Novrizal Fauzi, ST yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Pasangan (Silfia Namora Yanti, S.Ak) yang tiada henti hentinya mensupport dan mendoakan abang dalam pengerjaan skripsi ini.

10. Kepada (Kosimlee) yang telah menyianyiakan waktunya untuk bersendagurau dalam pengambilan data pada skripsi ini.

11. Kepada teman-teman seperjuangan IP. D angkatan 2015 dan kerabat-kerabat sahabat yang telah banya kmemberi support dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan sukses dimasa depan, aminyarobbal'alam.

Semoga semua bimbingan, dorongan, bantuan, semangat, ilmu pengetahuan, serta kasih sayang dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dan rahmat dari Allah SWT. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Januari 2020  
Penulis

Mardil Hajar

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>11</b>
A. Studi Kepustakaan.....	11
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	11
2. Konsep Pemerintahan.....	12
3. Konsep Pemerintah .....	14
4. Konsep Kebijakan .....	16
5. Konsep Pengelolaan .....	19
6. Manajemen Pemerintahan .....	22
7. Fungsi Pemerintahan .....	24
8. Asas-Asas Pemerintahan Daerah .....	26
9. Teori Perencanaan .....	27
10. Teori Pengorganisasian .....	28
11. Teori Pengendalian.....	30
B. Penelitian Terdahulu.....	32
C. Kerangka Pikir .....	33
D. Konsep Operasional .....	34
E. Operasional Variabel.....	35

<b>BAB III BAHAN/OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Tipe Penelitian .....	37
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Jenis dan Sumber Data .....	39
D. Penentuan Informan .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Instrumen Penelitian.....	41
G. Trigulasi Dan Validitas Data .....	41
H. Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Kondisi Geografis .....	47
B. Keadaan Alam.....	47
C. Sungai.....	47
D. Iklim .....	48
E. Sejarah Singkat Kecamatan Rambah .....	48
F. Pembagian Wilayah Kecamatan .....	49
G. Kepadatan Penduduk.....	50
H. Keadaan Ekonomi .....	50
I. Sejarah Pasar Modern.....	50
J. Visi Dan Misi Pasar Modern .....	51
K. Tugas Pokok Dan Fungsi Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya.....	52
L. Struktur Organisasi Perusahaan Rokan Hulu Jaya .....	56
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Identitas Responden .....	57
B. Hasil Penelitian Dan Observasi Peneliti di Lapangan.....	60
1. Perencanaan Pengelolaan Pasar Modern .....	60
2. Pengorganisasian Dalam Pengelolaan Pasar Modern.....	65
3. Pengendalian Dalam Pengelolaan Pasar Modern.....	70
4. Hambatan-hambatan Dalam Pengelolaan Pasar Modern .....	73
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75

B. Saran..... 76

**DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 78**

**Dokumen Lain..... 82**



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

### Tabel

II.1. Penelitian Terdahulu Tentang Pengelolaan Pasar Modern Oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.....	32
II. 2. Konsep Operasional Variabel Penelitian Tentang Pengelolaan Pasar Modern Oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.....	35
III.1. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pengelolaan Pasar Modern Oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.....	45
V.1. Informan Menurut Jenis Kelamin.....	58
V.2. Informan Berdasarkan Pendidikan.....	59
V.3. Informan Berdasarkan Usia.....	60

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

- II. 1. Kerangka Pikir Tentang Pengelolaan Pasar Modern Oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.....33





## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintahan serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana di sebutkan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Dan dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut diatur dalam Pasal 18 A ayat (1) yang menyatakan bahwa

Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara Provinsi, Kabupaten, dan Kota diatur dengan undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut menurut asa ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan Absolut, urusan pemerintahan Konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum.

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerinthan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat .
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah

kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi Daerah.

3. urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Hal-hal yang menjadi urusan pemerintahan umum antara lain soal pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, serta pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan menjadi domain pemerintah daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan.

- a. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, baik yang terkait dengan pelayanan dasar maupun yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Yang terkait dengan pelayanan dasar misalnya soal pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Yang tidak terkait dengan pelayanan dasar antara lain soal tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pagan,

pertanahan, lingkungan hidup, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- b. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Urusan pemerintahan pilihan ini meliputi antara lain soal pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Semua urusan pemerintahan konkuren tersebut dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, ekstrensitas, dan kepentingan strategis nasional.

Pada hakikatnya otonomi daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung warga masyarakat. Pengertian dari desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Jadi dengan adanya otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri terutama di bidang keuangan. Karena penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerimaan sumber-sumber yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan sendiri.

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah, karena suatu daerah harus mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka pemerintah memberikan bantuan sumber pembiayaan untuk pemerintah daerah. Akan tetapi, mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan untuk menggali semua sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu upaya bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber keuangannya adalah dengan memanfaatkan sebaik-baiknya Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jadi, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memanfaatkan dan mengelola semua barang milik daerah yang berada di wilayahnya guna untuk meningkatkan sumber keuangan daerah. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan untuk mengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Kepala Daerah dalam menjalankan wewenangnya harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Kampar, berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Dalam perkembangannya saat ini Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 146 Desa, luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu +7.449,85 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 474.457 jiwa terdiri dari 245.249 penduduk laki-laki (51,69 %) dan 229.208 penduduk perempuan (48,31 %). Kabupaten Rokan Hulu sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat, dan sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Kecamatan Rambah merupakan salah satu Kecamatan dari 16 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di pusat Kota yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu. Luas wilayah Kecamatan Rambah adalah +394,65 km<sup>2</sup> yang membawahi 1 Kelurahan dan 13 Desa.

Kecamatan Rambah adalah salah satu kecamatan yang memiliki Aset Daerah yakni Pasar Modern, Pada awal berdirinya pasar modern ini pada tanggal 1 Februari 2011 yang di kelola oleh pihak pasar yang profesional mempunyai tekad kuat untuk memajukan pasar modern yang berkualitas. Pasar yang berawal dari pasar tradisional kemudian menjadi pasar modern yang berlokasi di Pasir

Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Yang berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti : buah, sayuran, daging, sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian. Untuk menjaga keberlangsungan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2010 di jelaskan bahwa Pengelolaan Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian diberikan kepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu jaya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan laba dari hasil usaha Perusahaan Daerah serta terwujudnya pasar daerah yang tertib, bersih, indah, aman, dan nyaman maka perlu adanya Wewenang dan Kewajiban Pengelola dalam pasal 4 yaitu:

- 1) Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya berwenang untuk melaksanakan pengelolaan Pasar Modren, Tradisional Pasir Pengaraian dalam bentuk pengurusan dan pungusahan agar Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan perkembangan pelayanan masyarakat.
- 2) Untuk menyelenggarakan pengelolaan Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian, Perusahaan Daerah berwenang dalam pengaturan, rencana pengembangan, pengendalian, dan pengurusan Pasar Modren serta fasilitas pasar lainnya.

3) Wewenang pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain meliputi;

- a. **Penentuan klasifikasi tempat;**
- b. Pengelompokan jenis barang dagangan;
- c. Penempatan pedagang;
- d. Penataan tempat berdagang, lokasi perkantoran dan perbankan;
- e. Pengelolaan sampah, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan di lokasi pasar;
- f. Pengelolaan parkir di halaman pasar;
- g. Tata cara memperoleh izin berdagang, perkantran dan perbankan di lokasi pasar;
- h. Pengenaan dan pengelolaan pendapatan dari pungutan terhadap para pedagang di pasar;
- i. Bongkar muat;
- j. Penyewaan lahan/tempat reklame;
- k. Penentuan waktu kegiatan pasar;

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk menata pasar modern tersebut maka dari itu dikelola oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya adalah Aset Pemerintahan Daerah.

Namun berdasarkan uraian di atas peneliti menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan pasar modern dipasir pengaraian, adapun fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya Pengelolaan Pasar Modern yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dalam pemanfaatan Kios dan Lios. Yang mana dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat 3 Poin a tentang penentuan klarifikasi tempat. Dalam hal ini yang peneliti liat saat melakukan penelitian yaitu belum lengkapnya fasilitas pasar, terutama belum siapnya pembangunan pada lantai 3 dan 4.



2. Belum maksimalnya pengelolaan pasar modern oleh perusahaan daerah dalam penentuan klasifikasi tempat, seperti penempatan sesuai dengan jenis barang dagangannya masing masing.
3. Terindikasi belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dalam pengelolaan Pasar Modern di Kecamatan Pasir Pengaraian.

Dengan melihat fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini tentang “Pengelolaan Pasar Modern Oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu “

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  
“Bagaimana Pengelolaan yang dilakukan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Dalam Mengelola Pasar Modern Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ?”

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Pengelolaan Pasar Modern yang dilakukan Perusahaan Daerah.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pengelolaan pasar modern Kabupaten Rokan Hulu.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan terutamadalam jurusan ilmu pemerinthan.

- b. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

### **3. Manfaat penelitian**

#### **1. Manfaat teoritis**

Untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain untuk meningkatkan kemampuan memecahkan suatu masalah yang ada.

#### **2. Manfaat praktis**

a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dalam Pengelolaan Pasar Modern Di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

b) Untuk menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai pengelolaan Pasar Modern oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang masalah konsep pada penelitian ini maka penulis merangkai beberapa pendapat para ahli dan teori sesuai dengan tujuan penelitian sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengemukakan maupun dalam menjawab permasalahan dalam penelitian Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini. Maka penulis merangkai beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik.

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Ndraha ( 2011 ; 7) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Syafiie (2005 ; 3) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (*eksekutif*), pengatur (*legislatif*), kepemimpinan dan organisasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Gaftar (dalam Ndraha, 2010 ; 16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai yang mempelajari proses politik dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2005 ; 32-33) ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki bagaimana sebaiknya unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasiaan kedalam hubungan antara dinas0dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis masalah kedalam dan keluar,
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan anantara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihidari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan yang lain, dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat serta daya tingkat yang efektif dan efesiensi dalam pemerintahan.
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

## **2. Konsep Pemerintahan**

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi menurut Syafiie (2007 : 4) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki empat unsur yaitu, terdiri dari dua pihak unsur yang di perintah yaitu rakyat,

unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan.

- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organisasi yang mengurus. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Ndraha (2010 :6) pemerintahan gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Rasyid (2002:14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pembontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara-cara kekerasan
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih terlaksana.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

### 3. Konsep Pemerintah

Sedangkan menurut Ndraha (2011 : 6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan. Kemudian menurut Syafiie (2011: 4) pemerintah adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal atau pun hal ikhwal pemerintah itu sendiri. Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 3 (tiga) unsur yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat yang pertama pihak yang memerintah di sebut penguasa atau pemerintah dan juga didalam pemerintah terdapat fungsi-fungsi pemerintah tersebut adalah, Pelayanan yang mana dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan adalah suatu perilaku atau cara melayani dan usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan ( uang ), jasa, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa. Dan juga pelayanan sifatnya dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi, dan pelayanan itu kenyataannya terdiri atas tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya tidak sosial, produk dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi ditempat yang sama. Kemudian fungsi pemerintah selanjutnya adalah Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami

masalah kemiskinan, sebagai proses pemberdayaan yang merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade* utilitas dari obyek yang diberdayakan. Fungsi pemerintah selanjutnya adalah Pembangunan suatu yang, dari, oleh, untuk masyarakat, sehingga, pembangunan bukanlah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat, dan juga pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan. Artinya, pembangunan harus dimasukan untuk benar-benar memperbaiki mutu hidup setiap individu dan masyarakatnya, dan bukannya mengorbankan manusia dan (masyarakatnya) demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

- b. Yang kedua pihak yang diperintah yaitu rakyat
- c. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan

Sehubungan dengan fungsi-fungsi yang diemban oleh pemerintah Soewargono dan Djohan (dalam Labolo, 2011 : 37) menyatakan bahwa “salah satu fungsi utama pemerintah adalah membuat kebijakan”. Mengingat semua warga Negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang di atur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum.

#### 4. Konsep Kebijakan

Secara pemikiran praktis, kebijakan (*policy*) adalah perintah atasan. Atasan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi pemerintah adalah pembuat kebijakan dalam suatu organisasi atau Negara. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengarah, pembimbing, fasilitator, sekaligus pemberitahuan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan serta mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat dan menghadapi tantangan yang mungkin dapat mengganggu proses perencanaan pembangunan diperlukan suatu strategi kebijakan yang tepat.

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum. Ndraha mengatakan dalam bukunya *kybernology* (Ilmu Pemerintahan baru) (2011;491) bahwa pada umumnya para pakar kebijakan sepakat bahwa "*policy*" adalah "*a course of action*". Penyebab dari sebuah aksi atau tindakan. Menurut Aranson (dalam Ndraha, 2011;491) "*policy is a pattern of collective action*".

Menurut Holwet dan M. Ramesh dalam (G Subarsono, 2005: 3) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas 5 (lima) tahapan penting yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.



2. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil kebijakan.

Banyak pakar menyebutkan bahwa pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung kootasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Untuk membuat suatu kebijakan haruslah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta setiap kebijakan yang dibuat pemerintah tidak bertentangan serta merugikan masyarakat, artinya kebijakan itu haruslah menjadi jawaban terhadap aspirasi masyarakat sehingga diperlukan suatu kebijakan yang bertanggung jawab dalam berbagai kebijakan.

Peran analisis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil itu benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang aka diterima oleh *public*, dan bukan atas asal menguntungkan golongan tertentu atau pembuat kebijakan.

Menurut Nugroho (2004:101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan yang dilihat dari kebijakn *public* yang ditujukan untuk melakukan

intervensi terhadap kehidupan *public* untuk meningkatkan kehidupan *public* itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (Dye dalam Nurcholis, 2007: 264).

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat di atas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku untuk umum dan untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan *public* dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Adi Nugroho, 2004:1-7).

Menurut Koryati (2005:2007), kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah *public* yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, maka penulis dapat menarik satu kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi,

cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

## 5. Konsep Pengelolaan

Kamus besar bahasa Indonesia (1997) kata pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola: yang artinya mengurus suatu bidang usaha (perusahaan, pertanian, dan sesuatu yang mempunyai tujuan). Sedangkan arti dari pengelolaan itu sendiri adalah proses, cara perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Balderton dalam Adisasmita, (2011;22) mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia yang memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Hamalik dalam Adisasmita. (2011;22) istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Moekijat dalam Adisasmita. (2011;21) Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Teori Adisasmita ini penulis jadikan sebagai indikator dalam penelitian ini, dalam teori ini dinyatakan ada 6 indikator untuk mengukur suatu pengelolaan, namun penulis hanya mengambil 3 saja yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pengendalian. Karena ke 3 indikator yang ditetapkan sangat terkait dengan Objek penelitian ini.

Manajemen dan pengelolaan adalah proses pengelolaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota anggota dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2008:8).

Menurut Hasibuan (2004:40-41) manajemen atau pengelolaan terdapat beberapa fungsi yaitu:

1. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu.
2. Pengorganisasian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi seseorang penelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan.
3. Pengarahan adalah bagian yang sangat kritis dari tugas seorang manajer. Kemampuan untuk dapat mempengaruhi orang lain adalah kata lain dari pengarahan, dimana kemampuan seperti ini akan menentukan berhasil atau tidaknya seorang manajer.

4. Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut delegasi diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Daar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin terlaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Sedangkan menurut George R. Terry (2000:16-19) fungsi manajemen yaitu:

1. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikirin dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. Penggerakkan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi

agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

4. Pengawasan (*Controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, peorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

## **6. Manajemen Pemerintahan**

Menurut Untoro dan Halim (2007: 9), dengan menerapkan apa yang ada di dalam Manajemen strategis sektor publik, maka diharapkan sektor publik dapat :

- a. Menjadi instansi reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks.
- b. Mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal (*managing for result*)

- c. Mengubah orientasi instansi menjadi instansi berorientasi masa depan
- d. Mejadikan instansi adaptif dan fleksibel, mengurangi birokrasi yang rumit dan lebih transparan.
- e. Menjadikan instansi mampu memenuhi harapan masyarakat (pengguna layanan)

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2016:9) mengemukakan bahwa “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Salam (2004:11) Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Manajemen pemerintahan adalah Manajemen pemerintahan disebut manajemen public merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta.

## 7. Fungsi Pemerintahan

Fungsi pemerintahan, pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Pemerintah memiliki fungsi sebagai berikut:

### 1. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

### 2. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

### 3. Fungsi Pembangunan



Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

#### 4. Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*)

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi pemberdayaan Pemerintah Daerah adalah kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

#### 8. Asas-Asas pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut :

a. Asas sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

b. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.

d. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

## 9. Teori Perencanaan

Menurut Erly Suandy (2001:2) Perencanaan secara umum merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengertikulasikan) dengan jelas strateg-strategi (program), taktik-taktik (tata

cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Menurut Sjamsulbachri (2004:15) perencanaan merupakan proses dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dan strategi apa yang akan digunakan dalam usaha pencapaian tersebut.

Menurut Soekartawi (2000), Perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia.

Menurut Listyansih (2014:90) Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek , yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Menurut Siagian (2008:29), Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang sudah ditentukan.

Menurut Uno (2006:1) Definisi perencanaan dapat diartikan hubungan antara apa yang ada sekarang (*what is*) dengan bagaimana seharusnya (*what should be*) yang bertalian dengan kebutuhan penentuan tujuan, prioritas program, dan alokasi.

Menurut Hasibuan (dalam Syafie, 2007:49) rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Robbins and Coulter (2005:160) Perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi, menyusun strategi

menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, termasuk alokasi sumber daya yang diperlukan, jadwal kerja serta tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa pengertian tentang teori perencanaan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Didalam manajemen, perencanaan merupakan sebuah proses untuk mengartian suatu tujuan organisasi, membuat sebuah strategi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, serta mengembangkan sebuah rencana aktivitas kerja dalam organisasi. Perencanaan ialah proses yang penting dari semua manajemen sebab tanpa sebuah rencana fungsi-fungsi lain-pengorganisasian, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan, serta pengarahan.

#### **10. Teori Pengorganisasian**

Menurut George R. Terry (Hasibuan, 2009 : 119) pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Henry Fayol (Hasibuan, 2009 : 13) mengemukakan teori pengorganisasian mengenai organisasi lini yaitu terdapat pemusatan wewenang pada tingkat pimpinan organisasi sehingga berbagai fungsi berpusat dalam tangan pimpinan tertentu karena dengan tegas memisahkan bidang kegiatan pimpinan (manajerial sebagai pusat wewenang) dan bidang kegiatan teknis (nonmanajerial).

Akibatnya muncul persyaratan tertentu (generalis serba,bisa berpengalaman luas) bagi jabatan pimpinan yang berbeda dari pekerja teknis/spesialis yang berpengalaman kejuruan.

Menurut Kontz dan O'Donnel (Malayu Hasibuan, 2009 :119) menurut mereka fungsi pengorganisasian manajer meliputi penentuan penggolongan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk tujuan-tujuan perusahaan, pengelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam suatu bagian yang dipimpin oleh seorang manajer, serta melimpahkan wewenang untuk melaksanakannya.

Menurut Siagian (2008:6) mengemukakan Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan

Menurut Hasibuan (2009 : 122) fungsi pengorganisasian yaitu:

- a. Manusia, artinya organisasi baru ada jika ada unsure manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin.
- b. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada jika ada tempat kedudukannya.
- c. Tujuan artinya, organisasi baru ada apabila ada tujuan yang hendak dicapai.
- d. Pekerjaan, artinya organisasi itu baru ada jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta ada pembagian pekerjaan.

- e. Struktur, artinya organisasi itu baru ada jika ada hubungannya dan kerjasama antar manusia yang satu dengan yang lainnya.
- f. Teknologi, artinya organisasi itu baru ada jika terdapat unsur teknis.
- g. Lingkungan, artinya organisasi itu baru ada jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi misalnya ada sistem kerjasama sosial.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa Pengorganisasian adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur, serta membagi tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Manusia merupakan unsur terpenting dalam pengorganisasian karena manusia terdapat di dalam tugas-tugas yang saling berhubungan.

### **11. Teori Pengendalian**

Menurut Mathis RL dan Jackson J.H (2008:89) Pengendalian merupakan pemantau kemajuan dari organisasi atau unit kerja terhadap tujuan - tujuan dan kemudian mengambil tindakan - tindakan perbaikan jika diperlukan.

Menurut Sondang P. Siagian masih dalam buku Nanang Fattah (2007:176) Menjelaskan bahwa Pengendalian adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Firdaus Ahmad Dunia Wasilah (2009 :5) mengemukakan bahwa Pengendalian merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus menerus antara

pelaksanaan dengan rencana. Melalui proses membandingkan hasil yang sesungguhnya dengan program atau anggaran yang disusun, maka manajemen dapat melakukan penilaian atas efisiensi usaha dan kemampuan memperoleh laba dari berbagai produk. Di samping itu, para manajer dapat mengadakan tindakan koreksi jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang timbul dari hasil perbandingan tersebut.

Menurut Azhar Susanto (2008:95) pengendalian (*control*) yaitu Pengendalian (*control*) meliputi semua metode, kebijakan dan prosedur organisasi yang menjamin harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kelayakan data manajemen serta standar operasi manajemen lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah suatu cara atau alat yang ditempatkan untuk memastikan bahwa hal-hal yang strategik telah dicapai. Pengendalian berarti proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian Terdahulu yang menjadi Referensi dan acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu.

	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan

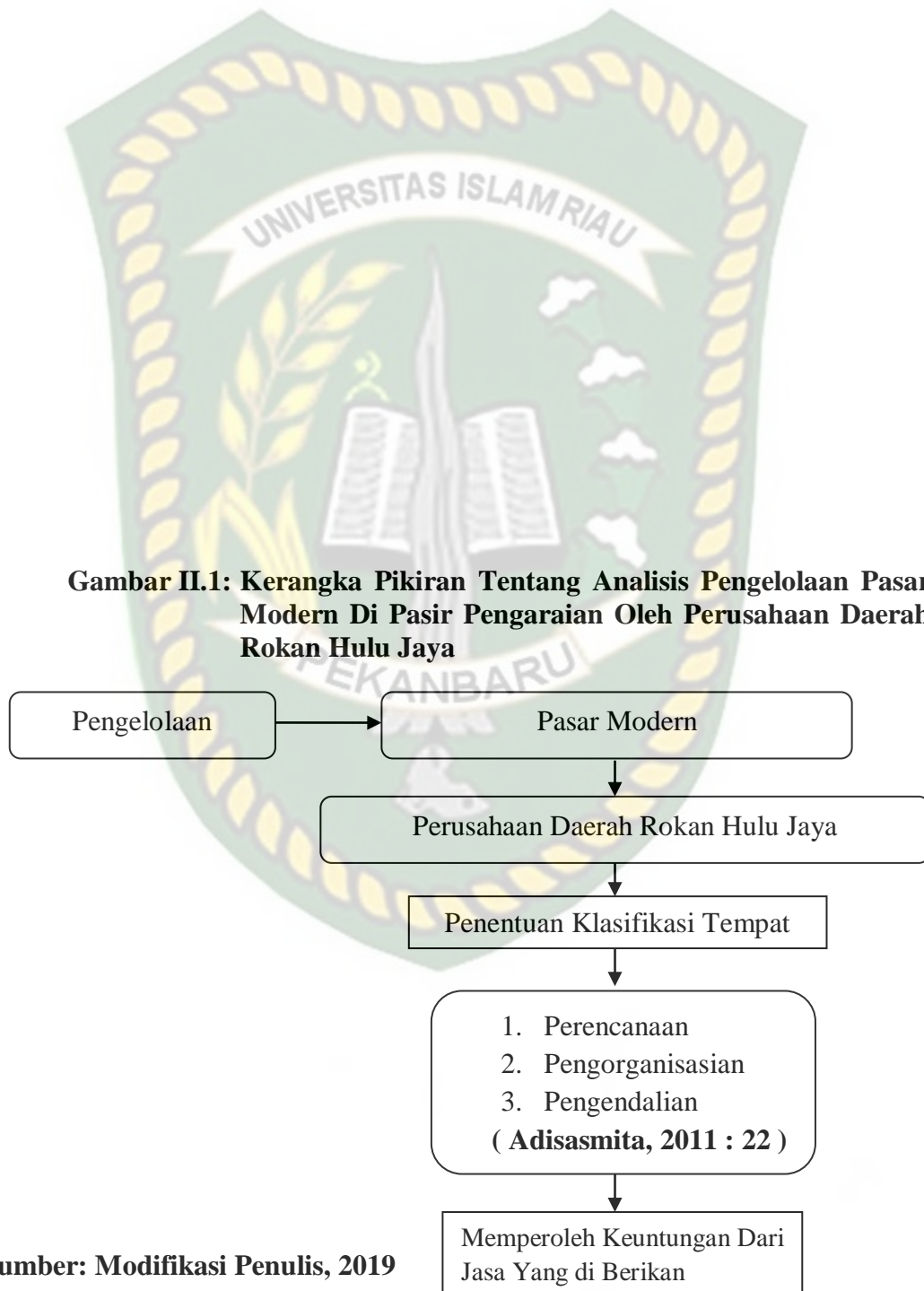
No	1	2	3	4
1	Tri utami Tahun 2013	Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Depok (Studi kasus : Pasar Agung, Pasar Cisalak, dan Pasar Kemiri Muka)	Menggunakan konsep pengelolaan menurut Adisasmita tahun 2011 : 22 , dan juga sama- sama menggunakan indikator Perencanaan, Pengorganisasian, Pengendalian	1. Metode Penelitian Menggunakan pendekatan kuantitatif, dan saya menggunakan pendekatan kualitatif. 2. Lokasi penelitian
2	Evi Revita Sari Tahun 2017	Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lebak.	Metode Penelitian Menggunakan pendekatan kuantitatif, dan Tujuan Penelitian Tentang Pengelolaan Pasar.	1. Lokasi penelitian. 2. Indikator Yang digunakan Menurut Henry Fayol dalam Athoillah (2010 :95 ). Yakni
				Perencanaan Pengorganisasian , kesatuan Perintah, Pengawasan.

### C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variable penelitian dengan indikator-indakator yang mempengaruhinya, yang dilandasi oleh konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun



kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisis variable dalam penelitian ini, yang digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



**Gambar II.1: Kerangka Pikiran Tentang Analisis Pengelolaan Pasar Modern Di Pasir Pengaraian Oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya**

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

### C. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penggunaan konsep-konsep serta menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini maka penulis memperjelas tentang konsep yang akan dioperasionalkan di lapangan sebagaimana yang penulis maksudkan, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

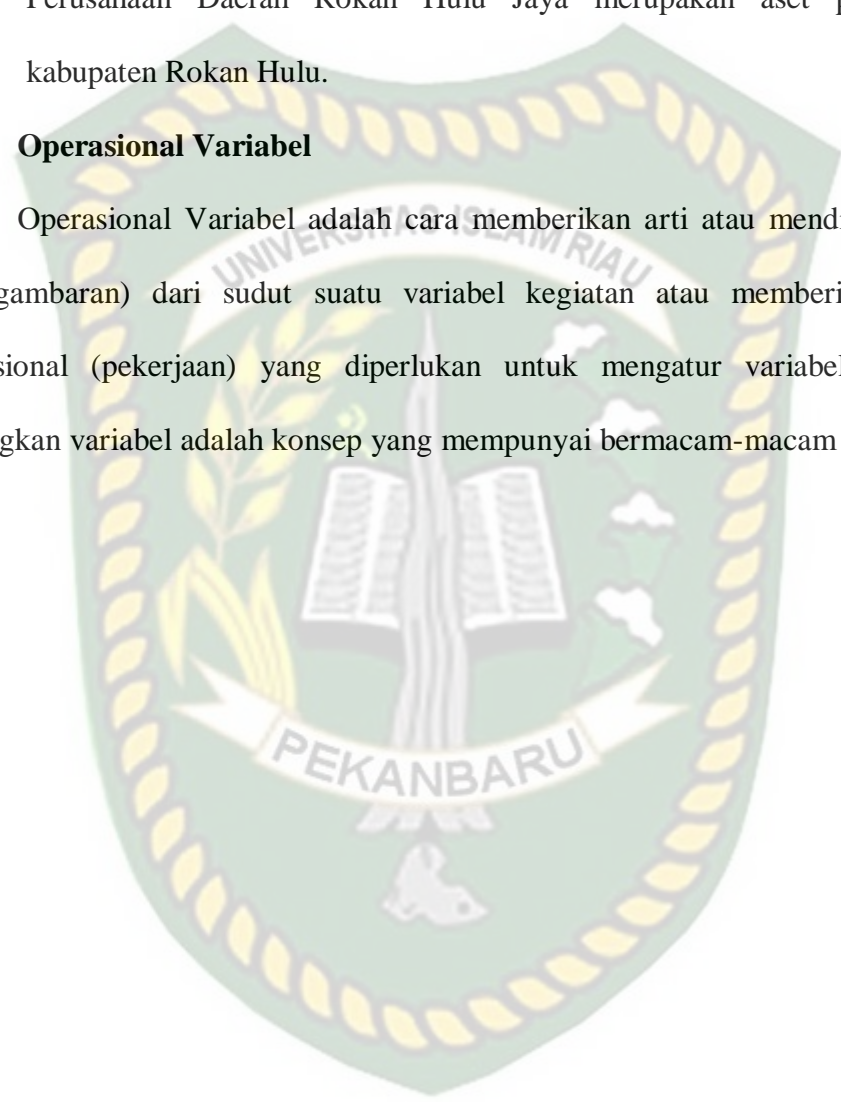
- a. Pemerintah daerah adalah perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.
- b. Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian.
- c. Perencanaan yang dimaksud yaitu Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dalam mengelola Pasar Modern di Pasir Pengaraian.
- d. Pengorganisasian yang dimaksud ialah mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya yang di tetapkan oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu jaya untuk pengelolaan Pasar Modern di Pasir Pengaraian.
- e. Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut delegasi diselesaikan seperti yang telah direncanakan oleh Perusahaan Rokan Hulu Jaya untuk Pengelolaan Pasar Modern. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin terlaksananya berbagai kegiatan

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya.

- f. Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya merupakan aset pemerintah kabupaten Rokan Hulu.

#### **D. Operasional Variabel**

Operasional Variabel adalah cara memberikan arti atau mendiskripsikan (penggambaran) dari sudut suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengatur variabel tersebut. Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.



**Tabael II.1: Konsep Operasional Variabel Tentang Analisis Pengelolaan Pasar Modern Di Pasir Pengaraian Oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya**

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang Dinilai
1	2	3	4
Adisasmita, (2011;22) mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan ,mengorganisa sikan, dan mengarahkan usaha manusia yang memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan	Pengelolaan	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya target yang ingin dicapai</li> <li>2. Adanya pengelolaan Klasifikasi tempat</li> </ol>
		Pengorganisasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya tim yang dibentuk untuk Klasifikasi Tempat</li> <li>2. Adanya pembagian tugas dan wewenang</li> <li>3. Adanya petugas pengawas</li> </ol>
		Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pemeriksaan pekerjaan petugas pasar dilapangan</li> <li>2. Adanya pemeriksaan hasil pekerjaan pegawai yang menangani redistribusi pasar dilakukan pemeriksaan dalam bentuk laporan pekerjaan pada petugas atau pegawai</li> </ol>

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan dan kegunaan tertentu. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui suatu yang mempunyai langkah – langkah sistematis.

#### A. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011:11), penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Maka metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Dengan demikian, peneliti beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, sedangkan ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adanya yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data

Jenis penelitian deskriptif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Peranan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Dalam Pengelolaan Pasar Modern Di Kecamatan Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu secara mendalam dan komprehensif. Selain itu dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan pasar modern ini.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Alasan pemilihan Lokasi di Rokan Hulu karena Pasar Modern adalah Aset Daerah yang seharusnya menjadi pusat perbelanjaan bagi masyarakat rokan hulu, Akan tetapi pada kenyataannya Pasar Modern di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu belum terlalu banyak diminati oleh masyarakat karna penataan tempat belum sesuai seperti yang diinginkan yang di sebabkan karna pembangunan pada lantai 3 belum selesai.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara kepada informan berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti. Adapun data primer tersebut yaitu data tentang identitas responden, perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dari pengelolaan pasar modern ini.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui peninggalan tertulis yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, dokumen, dan tulisan yang dianggap peneliti berkenan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### **D. Penentuan Informan**

Teknik pemilihan informan adalah teknik sampling purposif (*purposive sampling*). Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset. Sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel (Kriyantono, 2006) Menurut Spradley dalam Moleong, informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Subjek yang telah lama intensif menyatu dengan suatu kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh

kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.

2. Subjek masih terikat penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi (Moleong, 2000:165) .

Penentuan informan dalam penelitian ini dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Informan Formal : Dirut P.D Rokan Hulu Jaya
2. Informan Pendukung : Pedagang dan Masyarakat

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a) Wawancara; Teknik pengumpulan data melalui tanyajawab langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) *Observasi*; Mengamati secara langsung-tanpa mediator-sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-



hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

- c) Dokumentasi; Mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara membaca literature, tulisan, maupun dokumen yang dianggap peneliti berkenan dengan penelitian yang sedang diteliti.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Suharsimi Arikunto (2002:136), menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen penelitian ini menggunakan panduan wawancara dan panduan dokumentasi.

#### **G. Triangulasi Dan Validitas Data**

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif.

Validitas dalam penelitian kuantitatif dilihat berdasarkan akurasi sebuah alat ukur yaitu instrumen. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti.

Triangulasi merujuk pada konsistensi suatu penelitian. Tapi Patton (2001) memperingatkan bahwa inkonsistensi sebuah analisis tidak boleh dilihat sebagai kelemahan bukti, tetapi kesempatan untuk mengungkap makna lebih dalam data.

Ada 4 jenis penyajian triangulasi sebagai berikut:

1. Triangulasi Data (*Data Triangulation*) Peneliti menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda. Ada 3 sub jenis yaitu orang, waktu dan ruang.
  - a. Orang, data-data dikumpulkan dari orang-orang berbeda yang melakukan aktivitas sama.
  - b. Waktu, data-data dikumpulkan pada waktu yang berbeda.
  - c. Ruang, data-data dikumpulkan di tempat yang berbeda.

Bentuk paling kompleks triangulasi data yaitu menggabungkan beberapa sub-tipe atau semua level analisis. Jika data-data konsisten, maka validitas ditegakkan.

2. Triangulasi Antar-Peneliti (*Multiple Researchers*) Pelibatan beberapa peneliti berbeda dalam proses analisis. Bentuk kongkrit biasanya sebuah tim evaluasi yang terdiri dari rekan-rekan yang menguasai metode spesifik ke dalam Focus Group Discussion (FGD). Triangulasi ini biasanya menggunakan profesional yang menguasai teknik spesifik dengan keyakinan bahwa ahli dari teknik berbeda membawa perspektif berbeda. Jika setiap evaluator menafsirkan sama, maka validitas ditegakkan.
3. Triangulasi Teori (*Theory Triangulation*) Penggunaan berbagai perspektif untuk menafsirkan sebuah set data. Penggunaan beragam teori dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih baik saat

memahami data. Jika beragam teori menghasilkan kesimpulan analisis sama, maka validitas ditegakkan.

4. Triangulasi Metodologi (*Methodological Triangulation*) Pemeriksaan konsistensi temuan yang dihasilkan oleh metode pengumpulan data yang berbeda seperti penggabungan metode kualitatif dengan data kuantitatif atau melengkapi data wawancara dengan data observasi. Hasil survei, wawancara dan observasi, dapat dibandingkan untuk melihat apakah hasil temuan sama. Jika kesimpulan dari masing-masing metode sama, maka validitas ditegakkan.

Manfaat triangulasi adalah meningkatkan kepercayaan penelitian, menciptakan cara-cara inovatif memahami fenomena, mengungkap temuan unik, menantang atau mengintegrasikan teori dan memberi pemahaman yang lebih jelas tentang masalah.

Kelemahan utama triangulasi yaitu memakan waktu. Mengumpulkan data beragam membutuhkan perencanaan lebih besar dan organisasi sumber yang tidak selalu tersedia. Kelemahan lainnya bias dan konflik kerangka teoritis.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984) mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data:

1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data, harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

## I. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel III.1 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pengelolaan Pasar Modern Oleh Persuahan Daerah di Kecamatan Rambah kabupaten Rokan hulu.**

No	Jenis Kegiatan	Bulan, minggu dan Tahun Ke																			
		Februari 2019				Maret 2019				April 2019				Mei 2019				Juni 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP Dan Bimbingan																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuisisioner																				
5	Survay Lapangan																				
6	Analisis Data																				
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																				
8	Konsultasi Revisi Skripsi																				
9	Ujian Konferehen shif Skripsi																				
10	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kondisi Geografis

Letak dan Luas Daerah Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara 0,62-1,25 Lintang Utara dan 100,42-101,17 Lintang Selatan, 103,28 Bujur Timur, dengan luas wilayah 7.449.85 Km<sup>2</sup> dan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir.
2. Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat
3. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Siak.
4. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat.

#### B. Keadaan Alam

Sebagian besar Kabupaten Rokan Hulu merupakan daratan rendah dengan luas 6.332,57 Km (85%) dan perbukitan seluas 1.117,48 Km (15%) berada sepanjang kaki bukit barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat dengan ketinggian berkisar 300-500 meter diatas permukaan laut.

#### C. Sungai

Kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa sungai, dua diantaranya adalah sungai yang cukup besar yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri.

Selain sungai besar tersebut, terdapat juga sungai-sungai kecil antara lain Sungai Tapung, Sungai Dantau, Sungai Ngaso, Sungai Batang Lubuh, Sungai Batang Sosa, Sungai Batang Kumu, Sungai Duo (Langkut).

#### **D. Iklim**

Kabupaten Rokan Hulu mempunyai iklim tropis dengan temperatur 22-31 derajat celcius dan terdapat dua musim yaitu Musim Hujan dan Musim Kemarau. Musim kemarau pada umumnya terjadi antara bulan Maret sampai dengan Agustus sedangkan musim hujan terjadi bulan September sampai dengan Januari.

#### **E. Sejarah Singkat Kecamatan Rambah**

Kecamatan Rambah merupakan salah satu Kecamatan dari 16 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di pusat Kota yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu. Luas wilayah Kecamatan Rambah adalah +394,65 km<sup>2</sup> yang membawahi 1 Kelurahan dan 13 Desa.

Kecamatan Rambah sebagai bagian dari perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Bupati dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. Kecamatan Rambah dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati yang disesuaikan dengan kebutuhan Kecamatan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. Mengingat pentingnya peran Kecamatan tersebut dan adanya tuntutan dari warga masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, maka diperlukan kemampuan dan kapasitas pemerintah Kecamatan yang memadai. Pemerintah Kecamatan sendiri sudah berupaya untuk memperbaiki pelayanannya dalam kerangka memenuhi kebutuhan warganya. Penerapan loket Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan contoh upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan.

#### **F. Pembagian wilayah Kecamatan**

Adapun luas wilayah Kelurahan / Desa dan jumlah penduduk setiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Rambah adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Pasir Pengaraian. Luas wilayah Kelurahan Pasir Pengaraian 17 km<sup>2</sup>.
2. Desa Rambah Tengah Utara Luas wilayah Desa Rambah Tengah Utara 10,56 km<sup>2</sup>.
3. Desa Rambah Tengah Hilir Luas wilayah Desa Rambah Tengah Hilir 48,00 km<sup>2</sup>.
4. Desa Rambah Tengah Hulu Luas wilayah Desa Rambah Tengah Hulu 56,04 km<sup>2</sup>.
5. Desa Rambah Tengah Barat Luas wilayah Desa Rambah Tengah Barat 35,10 km<sup>2</sup>.
6. Desa Menaming Luas wilayah Desa Menaming 72,30 km<sup>2</sup>.
7. Desa Pasir Baru Luas wilayah Desa Pasir Baru 10,00 km<sup>2</sup>.
8. Desa Sialang Jaya Luas wilayah Desa Sialang Jaya 36,00 km<sup>2</sup>.
9. Desa Tanjung Belit Luas wilayah Desa Tanjung Belit 12,00 km<sup>2</sup>.
10. Desa Babussalam Luas wilayah Desa Babussalam 20,18 km<sup>2</sup>.
11. Desa Pematang Berangan Luas wilayah Desa Pematang Berangan 20,17 km<sup>2</sup>.
12. Desa Suka Maju Luas wilayah Desa Suka Maju 27,30 km<sup>2</sup>.



13. Desa Koto Tinggi Luas wilayah Desa Koto Tinggi 20,00 km<sup>2</sup>.

14. Desa Pasir Maju Luas wilayah Desa Pasir Maju 10,00 km<sup>2</sup>.

### **G. Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk Kecamatan Rambah berdasarkan sumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu per tahun 2017 sebagai berikut :

- Jumlah penduduk : 54.188 jiwa
- Laki – laki : 27.626 jiwa
- Perempuan : 26.562 jiwa

### **H. Keadaan Ekonomi**

Kondisi perekonomian di Kecamatan Rambah pada umumnya sudah menunjukkan peningkatan. Masyarakat sudah mulai berperan aktif dalam perekonomian yang dapat dilihat dari jumlah sarana. perekonomian yang ada di Kecamatan Rambah yang terdiri dari 3 unit pasar Swadaya masyarakat, 1 unit Pasar Pemda, 1 Unit Pasar Modern, 2 KUD, 6 UED-SP, 5 BUMDes, 1PNPM-MP, 1 Unit Capim Bank Riau, 3 Unit Capim BRI, 1 Unit PD BPR Rohul, 1 unit Capim Bank Mandiri, 1 Unit Capim BNI, 1 unit Bank Sarimadu, 1 Unit Capim Bank Danamon.

### **I. Sejarah Pasar Modern**

Pada awal berdirinya pasar modern ini pada tanggal 1 Februari 2011 yang di kelola oleh pihak pasar yang profesional mempunyai tekad kuat untuk memajukan pasar modern yang berkualitas. Pasar yang berawal dari pasar tradisional

kemudian menjadi pasar modern yang berlokasi di Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Yang berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti : buah, sayuran, daging, sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian. Untuk menjaga keberlangsungan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2010 di jelaskan bahwa Pengelolaan Pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian diberikan kepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu jaya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan laba dari hasil usaha Perusahaan Daerah serta terwujudnya pasar daerah yang tertib, bersih, indah, aman, dan nyaman.

#### **J. Visi Dan Misi Pasar Modern**

Visi Pasar Modern Pasir Pengarayan Terwujudnya pasar tradisional bernuansa modern yang bersih, tertib, indah, aman, nyaman, dan sarana unggulan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Pasir Pengarayan.

Adapun Misi Pasar Modern Pasir pengaraian Segala upaya untuk membangun sistem pasar yang modern dan berkualitas, sehingga dalam sistem perdagangannya baik.

Misi pasar modern sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan membangun infrastruktur pasar yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
- b. Memelihara sarana dan prasarana pasar, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kenyamanan pasar.
- c. Membangun sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berwawasan kedepan dalam upaya memajukan pasar modern.
- d. Menata manajemen dari berbagai aspek sesuai dengan perkembangan zaman.
- e. Mengembangkan ekstensifikasi berbagai potensi pendapatan yang dimiliki melalui kemitraan dengan pihak ke tiga.

**K. Tugas Pokok dan fungsi Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya**

1. Dirut PD. RokanHulu Jaya bertugas memimpin :
  - a. Mengkoordinasikan tugas.
  - b. Mengawasi bawahannya masing-masing.
  - c. Pemimpin bertanggung jawab seluruh aktivitas kantor dan pasar.
2. Manager operasional bertugas bertanggung jawab terhadap semua kelancaran operasional kantor seperti:
  - a. Jam kerja.
  - b. Kendaraan.
  - c. Perawatan inventasi kantor.
  - d. Pemakaian telepon atau faks, kebersihan kantor.
  - e. Kenyamanan hubungan dengan karyawan.
3. Manager keuangan dan ADM yang bertanggung jawab:

- a. Mengontrol keuangan berapa masuk.
  - b. Berapa keluar uang yang diperlukan.
  - c. Menetapkan struktur keuangan entitas.
  - d. Mengalokasikan dana sedemikian rupa agar dapat memperoleh tingkat efisiensi atau profitabilitas yang optimal.
  - e. Mengendalikan keuangan perusahaan dengan mengadakan sistem dan prosedur yang dapat mencegah penyimpangan.
4. Bendahara bertanggung jawab:
- a. Menyimpan semua uang yang disetorkan setiap harinya.
  - b. Melaporkan uang masuk dan keluar.
  - c. Memeriksa pembukuan satu tahun kebelakang.
  - d. Mempelajari rencana kegiatan selama periode kepengurusan.
5. Kasir bertanggung jawab:
- a. Berapa setorankarcis yang terjual.
  - b. Mengatur semua kelengkapan berapa terjual semua karcis baik itu masuk atau pun keluar kendaraan.
  - c. Menjalankan proses penjualan dan pembayaran.
  - d. Melakukan pencatatan atas semua transaksi.
  - e. Membantu pelanggan dalam memberikan informasi.
  - f. Melakukan proses transaksi pelayanan jual beli serta melakukan pembungkusan.
  - g. Melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepadaatasan.



- d. Mengawasi pelaksanaan pencatatan pengeluaran biaya-biaya yang terjadi dengan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh manajer.

10. Kabag parkir

- a. Mengatur semua kendaraan yang masuk.
- b. Mengatur keluar kendaraan dari areal pasar modern pasir pengarayan agar tidak terjadi seperti yang tidak kita inginkan.

11. Pelayana tempat bertanggung jawab dengan:

- a. Tempat yang diberikan atau yang sudah diatur dalam struktur pasar untuk penjual dalam lokasi pasar modern pasir pengarayan.
- b. Dalam pelayanan harus jujur dan ramah.
- c. Memberikan tempat yang nyaman agar tidak terjadi konflik antara satu dengan yang lainnya.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Pasar Modern oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu maka akan dijelaskan berdasarkan uraian berikut ini :

#### A. Identitas Responden

Informan yang terdapat di dalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informan di dasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat itu.

##### 1. Jenis kelamin

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bahan analisis faktor – faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana Pengelolaan dalam penentuan klasifikasi tempat di Pasar Modern Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Distribusi informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel ini :

**Tabel V.1**  
**Informan Menuurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	5
2	Perempuan	7
Jumlah		12

*Sumber* : modifikasi penulis, 2019.

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat di jelaskan bahwa informan tentang pengelolaan pasar modern oleh perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu adalah Laki-Laki dengan jumlah 5 orang sedangkan Perempuan berjumlah 7 orang dari total informan yang berjumlah 12 orang.

1. Pendidikan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian. Mengingat penelitian merupakan penelitian lapangan dengan melibatkan beberapa unsur, maka informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel V. 2**



### Informan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Tidak Sekolah	1
2	SD	-
3	SMP	4
4	SMA	6
5	D1-D3	-
6	D4-S1	-
7	S2	1
8	S3	-
Jumlah		12

*Sumber* : modifikasi penulis, 2019

Berdasarkan tabel V.2 di atas dapat dijelaskan bahwa informan berdasarkan tingkat pendidikan tidak bersekolah 1 orang, sedangkan tingkat informan yang berpendidikan terakhir SD tidak ada, 4 orang informan mempunyai pendidikan terakhir SMP, dan SMA 6 orang sedangkan pendidikan terakhir dari D1 sampai S1 tidak ada, pendidikan terakhir yang tertinggi dari informan ialah S2 dari total keseluruhan pendidikan terakhir informan yang berjumlah 12 orang.

#### 2. Usia Informan

Dalam menentukan informan, juga dilihat faktor usia, dengan pertimbangan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, dan

juga mempengaruhi pola pikir dan standar kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel V. 3  
Informan Berdasarkan Usia**

No	Umur	Jumlah
1	20 – 30	4
2	31 – 40	6
3	41 – 50	2
Jumlah		12

*Sumber* : modifikasi penulis, 2019

Berdasarkan tabel V.3 diatas dapat dijelaskan bahwa informen yang berusia 20-30 Tahun berjumlah 4 orang, informen yang berusia 31-40 tahun yaitu berjumlah 6 orang sedangkan, informen yang berusia 41-50 Tahun ada 2 orang dari keseluruhan usia informen yang berjumlah 12 orang.

## **B. Hasil Penelitian dan Observasi Peneliti dilapangan**

### **1. Perencanaan dalam Pengelolaan Pasar Modern**

*Planning* (perencanaan) Perencanaan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah dalam Pengelolaan Pasar Modern, dengan melakukan perencanaan tersebut kepala Direktur Perusahaan Daerah bekerja sama dengan para petugas untuk merencanakan kinerja yang baik untuk pengelolaan pasar, dengan perencanaan yang baik selalu memiliki sasaran yang jelas.

Demikian pula halnya dalam perencanaan, selalu dimulai dengan menetapkan suatu sasaran. Pada dasarnya setiap orang yang bekerja memerlukan kejelasan tentang apa yang mereka kerjakan, hasil apa yang diharapkan dan juga alasan mengapa suatu pekerjaan harus dikerjakan. Dalam hal ini atasan bertanggung jawab untuk menjelaskan ketiga pertanyaan tersebut. Hal tersebut yang biasanya dituangkan dalam sasaran kerja. Dalam pelaksanaan pembangunan terutama proses awal yang harus dilakukan adalah penetapan rencana yang akan dikerjakan, karena dengan rencana yang jelas kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan akan lebih terarah dan sasaran akan tercapai. Sesuai rencana kerja yang baik tentu harus diawali dengan berbagai informasi terutama dari mereka yang akan dijadikan objek dari pembangunan itu sendiri, hal ini diperlukan bila pembangunan tersebut di peruntukkan bagi masyarakat itu sendiri

Menurut Erly Suandy (2001:2) Defenisi perencanaan adalah secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan tentang perancangan dalam mengelola klasifikasi tempat di Pasar Modern Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Menurut Nasrul Hadi selaku Direktur Perusahaan daerah Rokan Hulu Jaya :

“Dalam perencanaan yang kami lakukan yaitu ingin meningkatkan pengunjung pasar dengan meningkatkan tenaga kerja, meningkatkan manajemen, sumber daya manusia, membenahi infrastruktur. Ada pun perencanaan yang sudah kami lakukan yaitu perencanaan dalam pembangunan kantor, menambah kios kios seperti pakaian, sayuran, dan mengusulkan ke pada pemerintah untuk membuat mainan anak-anak di lantai dasar agar lebih fokus ke tempat hiburan anak-anak. Untuk tahapan dalam perencanaan ini agar berjalan dengan baik tahapan pertama yang harus di lakukan yaitu membenahi manajemen dengan cara membuat Sistem Operasi Terpadu (SOT), membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), memberikan Sumber Daya Manusia (SDM), Mengenai target yang ingin di capai yaitu kami merencanakan ingin membuat Pasar Modern Pasir Pengaraian ini menjadi salah satu Pusat pembelian yang di minati oleh Masyarakat luas”. ( Nasrul Hadi, 14 November 2019).

Dari hasil wawancara dengan Nasrul Hadi selaku direktur perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya yang pendidikan terakhirnya S2 yang sekarang umurnya berkisaran berusia 31-40 tahun tersebut, peneliti menyimpulkan didalam pengelolaan pasar modern oleh perusahaan daerah Rokan Hulu Jaya yang disampaikan oleh Nasrul Hadi selaku direktur perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya tentang perencanaan sudah membenahi struktur dan telah mengusulkan terhadap pemerintah untuk berfokus memberikan fasilitas pasar dan juga tempat hiburan untuk anak-anak yang bertujuan agar pasar modern ini menjadi pasar yang diminati oleh masyarakat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Abdulah selaku pedagang ikan segar untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang perencanaan yang di lakukan oleh perusahaan daerah dalam mengelola klasifikasi tempat di pasar modern :

“Mengenai perencanaan untuk klasifikasi tempat informasi yang saya dapat yang akan di lakukan oleh perusahaan daerah yaitu membuat tempat permainan anak-anak dilantai dasar agar meningkatkan pengunjung pasar modern di pasir pengaraian ini”. (Abdulah, 15 November 2019).

Dari hasil wawancara tentang perencanaan dengan Abdul selaku pedagang ikan segar yang pendidikan terakhirnya SMP yang sekarang usianya berkisaran 20-30 tahun, peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan yang akan dilakukan oleh perusahaan daerah sudah di ketahui oleh beberapa pedagang.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Sarivah selaku pedagang mainan untuk mendapatkan informasi tentang perencanaan perusahaan daerah dalam klasifikasi tempat :

“Perusahaan daerah berencana akan mengatur ulang tempat contohnya dagangan milik saya sendiri karena saya berjualan di lantai 2 yang akan di pindahkan ke lantai 1 karena yang saya ketahui dari salah satu petugas di pasar modern ini perusahaan daerah ingin memfokuskan lantai 1 sebagai tempat khusus bagi anak-anak tempat bermain dan tempat jualan mainan anak-anak”. (Sarivah, 15 November 2019).

Dari hasil wawancancara dengan Sarivah yang pendidikan terakhirnya SMA yang sekarang berusia kisan 20-30 tahun selaku pedagang mainan di pasar modern, peneliti menyimpulkan bahwa perusahaan daerah berencana akan mengatur ulang tempat penempatan pedagang yaitu akan memindahkan pedagang mainan ke lantai 1 karena di lantai 1 akan dijadikannya tempat bermain anak-anak dan penjual mainan anak-anak.

Untuk lebih memastika informasi tentang klasifikasi tempat di pasar modern ini penulis mewawancarai pedagang lainnya salah satunya pedagang sayuran yaitu dengan Maryam :

“Menurut ibuk bahwa perencanaan untuk menentukan tempat-tempat bagi kami pedagang memang sudah banyak beredar informasi bahwa akan di buatnya tempat khusus anak-anak atau tempat permainan anak-anak yaitu

yang terletak di lantai satu, jadi pedagang yang berada di lantai satu saat ini kemungkinan besar dalam tahun 2020 akan memulai di pindahkannya pedagang-pedagang sesuai dengan jenis jualannya masing-masing”. (Maryam, 15 November 2019).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Maryam sebagai pedagang sayuran yang pendidikan terakhirnya SMP yang sekarang berusia kisaran 31-40 tahun , peneliti menyimpulkan bahwa perusahaan daerah akan memindahkan atau menyusun ulang penempatan tempat sesuai perencanaan yang diinginkan, yaitu akan dilakukan pada Tahun 2020 agar penempatan tempat pedagang lebih tertata dengan baik.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Arif Saputra selaku pengunjung atau pembeli di pasar modern tersebut guna untuk mengetahui informasi tentang perencanaan perusahaan daerah dalam klasifikasi tempat di pasar modern pasir pengeraian Kabupaten Rokan Hulu :

“Masalah dalam perencanaan yang di lakukan oleh perusahaan daerah untuk klasifikasi tempat ini saya tidak banyak mengetahui hal tersebut namun informasi yang saya dapat dari beberapa pedagang langganan saya meraka mengatakan akan adanya pemindahan tempat-tempat yang telah di tetapkan karena perusahaan daerah ingin meningkatkan pengunjung di pasar modern ini agar lebih banyak dan menjadi salah satu tempat permainan anak-anak yang mewah dan ingin menjadi pusat permainan anak-anak”.(Arif Saputra,15 November 2019).

Dari hasil wawancara dengan Arif Saputra yang pendidikan terakhirnya SMA yang sekarang berusia berkisaran 20-30 tahun, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat tidak begitu mengetahui perencanaan yang akan di lakukan oleh perusahaan daerah terhadap klasifikasi tempat dipasar modern.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan direktur dan beberapa pedagang dan juga pengunjung peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan daerah dalam mengelola pasar modern untuk mengklasifikasikan tempat sudah ada yaitu dapat dilihat dari upaya dalam penentuan tempat permainan anak-anak khususnya di lantai satu dengan tujuan ingin menjadikan pasar modern ini salah satu pusat permainan anak-anak di Kabupaten Rokan Hulu.

Dari observasi peneliti tentang perencanaan dalam pengelolaan pasar modern ini ialah perusahaan daerah sudah merencanakan perencanaan yang sangat baik dengan membenahi manajemen dengan cara membuat Sistem Operasi terpadu (SOT), membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), memberikan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut Sjamsulbachri (2004:15) perencanaan merupakan proses dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dan strategi apa yang akan digunakan dalam usaha pencapaian tersebut.

## **2. Pengorganisasian dalam pengelolaan pasar modern**

*Organizing* atau pengorganisasian merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompokkan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Umumnya masalah organisasi

memegang peranan penting yaitu akan menentukan suatu pekerjaan seseorang yang harus dikerjakan dan siapa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut, oleh karena itu organisasi harus memiliki bentuk dan susunan.

Menurut Hasibuan (2009 : 122) fungsi pengorganisasian yaitu:

- h. Manusia, artinya organisasi baru ada jika ada unsure manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin.
- i. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada jika ada tempat kedudukannya.
- j. Tujuan artinya, organisasi baru ada apabila ada tujuan yang hendak dicapai.
- k. Pekerjaan, artinya organisasi itu baru ada jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta ada pembagian pekerjaan.
- l. Struktur, artinya organisasi itu baru ada jika ada hubungannya dan kerjasama antar manusia yang satu dengan yang lainnya.
- m. Teknologi, artinya organisasi itu baru ada jika terdapat unsur teknis.
- n. Lingkungan, artinya organisasi itu baru ada jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi misalnya ada sistem kerjasama sosial.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa Pengorganisasian adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur, serta membagi tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Manusia merupakan unsur terpenting



dalam pengorganisasian karena manusia terdapat di dalam tugas-tugas yang saling berhubungan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, menurut Nasrul Hadi selaku Direktur Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dalam pemberian tugas (Pengorganisasian) untuk mengelola klasifikasi tempat di Pasar Modern Pasir Pengaraian di Kabupaten Rokan Hulu :

“Dalam pemberian tugas atau wewenang terhadap tenaga kerja dalam mengelola Pasar Modern ini sudah mempunyai tugas masing-masing mulai dari Direktur Utama, Direksi, Menejer, Kordinator, dan jabatan lainnya sesuai dengan yang telah di tetapkan adapun petunjuk dalam pembuatan Tim atau Organisasi di sini kami melalui Permendagri No 54 Tahun 2017 tentang tenaga kerja dan Peraturan pemerintah No 37 Tahun 2017, Dalam membentuk Tim agar bisa bekerja sama dan mencapai tujuan yang di inginkan yaitu harus saling berkoordinasi, melakukan tindakan perbaikan temuan atau kejadian luar biasa yang terjadi dalam Managemen Perusahaan, untuk Tim Retribusi pasar sudah ada di bentuk yang bertugas memberikan laporan Retribusi pemasukan dari Pasar Modern kepada Manejer Perusahaan”.(Nasrul Hadi, 14 November 2019).

Dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan Nasrul hadi selaku direktur perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya yang pendidikan terakhirnya S2 yang berusia berkisaran 31-40 tahun, peneliti menyimpulkan bahwa pengorganisasian untuk mengelola pasar modern ini sudah mempunyai tugas masing-masing dan juga jabatan lainnya melalui Permandagri no 54 Tahun 2017.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, penulis juga mewawancarai Andri selaku pedagang di Pasar Modern tentang perorganisasian klasifikasi tempat di Pasar Modern Pasir Pengaraian Kabupaten Rookan Hulu :

“Dalam pembagian tugas di Pasar Modern ini saya melihat adanya pembentukan tim sebagai sebuah Organisasi untuk mengatur tempat contohnya seperti adanya tim yang mengatur tempat parkir yang terdiri dari 4 oraang dalam 2 tempat, keamanan yang teridiri dari 2 orang sebagai

security, kalau dalam penentuan klasifikasi tempat ini yang saya ketahui hanya 2 orang yang menentukan di mana lapak atau tempat berjualan dan kami selaku pedagang yang ingin berjualan harus memintak persetujuan atau melapor kepada tim khusus penentuan klasifikasi tempat”.(Andri, 15 November 2019).

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Andri yang pendidikan terakhirnya SMP yang sekarang berusia berkisaran 20-30 tahun, peneliti mengambil kesimpulan pengorganisasian sudah berjalan yang dapat di simpulkan dari perkataan Andri yang mengatakan pedagang harus melapor kepada tim khusus penentuan klasifikasi tempat.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Sari sebagai pedagang mainan anak-anak agar lebih banyak mengetahui tentang pembagian tugas atau tim yang telah di bentuk oleh Perusahaan Daerah dalam mengelola Pasar Modern Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu :

“Kalau untuk pembagian Tugas kerja di pasar modern ini oleh Perusahaan daerah saya lihat sudah Terbentuk karena setiap pekerja atau kariawan sudah memiliki tugasnya dan tanggung jawab masing-masing namun kebanyakan dari kariawan di sini terkadang kurang ramah kepada kami sebagai pedagang yang kurang akrab sehingga menimbulkan kurangnya kenyamanan”.(Sari,15 November 2019).

Dari hasil wawancara dengan Sari yang pendidikan terakhirnya SMA yang skrang berusia 31-40 tahun, peneliti mengamnil kesimpulan bahwa pengorganisasian sudah terbentuk namun karianwan yang menjalankan tugas kurang akrab dengan pedagang yang membuat pedangan merasa kurang nyaman dengan kariawan tersebut.

Selanjutnya peneliti belum menemukan jawaban yang memuaskan peneliti melakukan wawancara lagi dengan Nia Nasution sebagai pedagang sayur tentang pembagian tugas oleh perusahaan daerah dalam mengelola Pasar Modern :

“Memang dalam pembagian tugas sudah ada di Pasar Modern ini oleh Perusahaan Daerah namun masih ada yang bagi saya dalam pembagian tugas ini belum sesuai dengan tujuan yang di inginkan seperti yang saya lihat dari tim keamanan di Pasar Modern ini anggotanya masih kurang hal itu lah yang menyebabkan sering terjadinya kehilangan sehingga para pedagang dan pembeli masih ragu akan kenyamanan di Pasar Modern”. (Nia Nasution, 15 November 2019).

Dari wawancara dengan Nia Nasution yang pendidikan terakhirnya SMA yang sekarang berumur 31-40 tahun, peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya bahwa anggota dalam keamanan masih kurang karena masih sering terjadi kehilangan, yang mengakibatkan pengunjung kurang nyaman di Pasar Modern.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada Fariza Wati selaku pembeli atau pengunjung di Pasar Modern untuk mengetahui tentang pembagian tugas yang di lakukan oleh Perusahaan Daerah :

“Yang saya lihat dari pembagian tugas yang telah di tetapkan oleh Perusahaan Daerah untuk kariawan Pasar Modern tidak berjalan dengan cukup baik, seperti tim penjaga parkir yang kurang tepatnya atau kurang rapinya dalam menentukan tempat parkir kendaraan yang mengakibatkan tidak kenyamanan”. (Fariza Wati, 15 November 2019).

Dari hasil wawancara dengan Fariza Wati yang pendidikan terakhirnya SMA yang sekarang berumur 31-40 tahun, peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya ada beberapa tim yang tidak melakukan tugas dengan sebaik mungkin.

Dari hasil wawancara dengan direktur dan juga beberapa pedagang peneliti menyimpulkan bahwa dalam pembentukan tim dan pembagian tugas untuk mengelola pasar modern Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan dengan tujuan yang di inginkan, baik dalam tugas penjaga parkir, keamanan, dalam penentuan klasifikasi tempat termasuk juga Tim untuk Retribusi Pasar, yaitu dapat dilihat dari Laporan retribusi yang diberikan oleh Tim untuk Retribusi pasar tidak rutin dengan waktu yang telah di tentukan sehingga membuat penghasilan dari Pasar Modern tersebut tidak bisa ditentukan pertahun dan jugak tidak terbuka dengan Masyarakat, sehingga membuat pedagang, pengunjung / pembeli belum merasa puas atas kinerja dari kariawan Perusahaan Daerah.

Dari Observasi penulis tentang pengorganisasian yang sudah di terapkan di Pasar Modern bahwasanya setiap kariawan yang ada di pasar modern sudah diberikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, namun untuk pelaksanaan belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan, bisa dilihat dari tingkat keamaan yang ada di pasar modern belum maksimal karna masih banyak aduan tentang kehilangannya barang-barang pengunjung pasar modern contohnya seperti helm dan sebagainya.

Menurut Kontz dan O'Donnel (Malayu Hasibuan, 2009 :119) menurut mereka fungsi pengorganisasian manajer meliputi penentuan penggolongan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk tujuan-tujuan perusahaan, pengelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam suatu bagian yang

dipimpin oleh seorang manajer, serta melimpahkan wewenang untuk melaksanakannya.

### 3. Pengendalian dalam pengelolaan pasar modern

Pengendalian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Controlling* merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi Pengendalian atau *controlling* ini juga memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya.

Menurut Jones and George (2003:331) mengenai pengertian pengendalian (*controlling*) ini, Pengendalian adalah proses dimana para manajer memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam pengendalian, para manajer memantau dan mengevaluasi apakah strategi dan struktur organisasi bekerja seperti yang dikehendaki, bagaimana hal-hal tersebut dapat ditingkatkan dan bagaimana harus diubah jika tidak bekerja.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, menurut Nasrul Hadi selaku Direktur Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya tentang pengendalian dalam mengelola klasifikasi tempat di Pasar Modern Pasir Pengaraian di Kabupaten Rokan Hulu :

“Untuk pengendalian yang kami lakukan dalam pemeriksaan hasil kerja atau laporan sudah ada seperti mengendalikan keluar masuknya orang

atau barang, menyalakan atau mematikan seluruh oprasional seperti lampu, atau peralatan yang lainnya. Pengendalian yang kami lakukan ini terkadang menimbulkan ada hal-hal yang tidak disukai yaitu jika terjadi perselisihan antara pedagang dengan pedagang, pedagang dengan kariawan, pedagang dengan masyarakat lain jika kehilangan kendaraan atau barang lainnya dalam kawasan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, sedangkan dalam pengendalian tentang klasifikasi tempat di situ adanya laporan kinerja melalui BPKP (Padan Pemeriksaan Keuangan Provinsi) yang di laporkan setiap tahunnya”.(Nasrul Hadi, 14 November 2019).

Dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan Nasrul hadi selaku direktur perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya yang pendidikan terakhirnya S2 yang berusia berkisaran 31-40 tahun, peneliti menyimpulkan bahwa pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan daerah sudah berjalan namun terkadang menimbulkan beberapa hal yang tidak disukai tetapi perselisihan-perselisihan tersebut tetap berada dalam pengawasan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya.

Selanjutnya untuk mengetahui bagai mana pengendalian oleh Perusahaan Daerah terhadap kinerja pasar modern peneliti melakukan wawancara dengan Bambang selaku pedagang emas di pasar modern Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu :

“Mengenai pengendalian yang sudah di lakukan oleh Perusahaan daerah untuk pengelolaan klasifikasi tempat masih belum berjalan sesuai dengan rencana yang telah di buat karena kariawan di sini banyak yang kinerjanya tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing seperti kariawan dalam penentuan klasifikasi tempat yang di mana dalam pemberian informasi terhadap pedagang belum jelas untuk menentukan dimana tempat pedagang berjualan” (Bambang, 15 November 2019).

Dari hasil wawancara dengan Bambang yang pendidikan tertingginya SMA yang sekarang berusia 41-50 tahun, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Bambang merasa kariawan yang di beritugas dalam penentuan tempat belum

berjalan dengan baik dikarenakan bambang merasa belum jelas dimana tempat pedagang emas seperti dirinya di tempatkan.

Setelah itu peneliti mewawancarai Nur selaku pengunjung atau pembeli tentang pengendalian dalam menentukan klasifikasi tempat :

“Menurut saya pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan daerah untuk penempatan klasifikasi tempat berjalan dengan baik karena saat ini saya sudah merasakan lebih mudahnya mencari baham perbelanjaan yang ingin saya beli”. (Nur, 16 November 2019).

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Nur yang tidak memiliki pendidikan terakhir yang sekrang berusia 41-50 tahun, peneliti menyimpulkan bahwa Nur sebagai pembeli lebih mudah memilih dagangan yang ingin di belinya karena tempat yang sudah di tentukan.

Selanjunya peneliti mewawancarai Risa sebagai pedagang pakaian agar peneliti mendapatkan informasi yang lebih jelas untuk pengendalian klasifikasi tempat di Pasar Modern Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu :

“Untuk pengendalian yang telah terjadi hingga sekarang saya tidak begitu merasakan perubahan-perubahan terhadap tempat yang kami sewa sebab usulan-usulan yang kami berikan tidak diterima oleh perusahaan daerah yang mengakibatkan kami tidak puas dengan apa yang di tetapkan oleh pengendalian yang di lakukan” (Risa, 15 November 2019).

Dari hasil wawancara dengan Risa yang tingkat pendidikan terakhirnya SMP yang berusia 31-40 tahun, peneliti mengambil kesimpulan bahwa usulan-usulan pedagang tidak begitu diterima oleh perusahaan daerah.

Setelah itu peneliti mewawancarai Armen selaku pengunjung atau pembeli tentang pengendalian dalam menentukan klasifikasi tempat :

“Menurut saya dalam pengendalian yang di lakukan oleh perusahaan daerah untuk menentukan tempat tidak berjalan dengan baik sehingga membuat pedagang disini banyak yang tidak suka terhadap tempat yang

telah ditentukan seperti tempat permainan anak-anak yang di buat karena biasanya permainan anak-anak itu ada di lantai paling atas agar di lantai 1 itu bisa diisi dengan pedagang lain seperti pakaian, tas, sepatu, untuk mempermudah pedagang mengisi barang dagangan di tokonya masing-masing”.(Armen, 16 November 2019).

Dari wawancara dengan Armen yang tingkat pendidikan tertingginya SMP yang berusia 31-40 tahun, peneliti mengambil kesimpulan untuk menentukan tempat yang di lakukan oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya kurang berjalan dengan baik dikarenakan sulitnya memasukkan barang dagangan jika dilantai satu di fokuskan untuk fasilitas anak-anak.

Dari hasil wawancara dengan Direktur dan beberapa pedagang dan juga pengunjung peneliti menyimpulkan bahwa untuk pengendalian yang di lakukan oleh Perusahaan Daerah dalam pengendalian klasifikasi tempat belum berjalan dengan efektif karena masih banyaknya penempatan pedagang belum sesuai dengan hasil yang di diharapkan,hal ini dapat dilihat dari rencana penempatan permainan anak anak yang akan di tempatkan di lantai 1 yang seharusnya keinginan pembeli dan pedagang permainan anak anak berada di lantai paling atas atau lantai 3 yang belum selesai pembangunannya akibat tidak adanya dana pembangunan dari pemerintah.

Dari Observasi penulis tentang pengendalian Pasar Modern belum terealisasi dengan baik, bisa dilihat dari klasifikasi tempat yang mana untuk lantai pertama pasar modern itu digunakan seharusnya khusus untuk tempat bermain anak-anak namun masih banyak juga lantai 1 tersebut digunakan pedagang untuk berjualan baju,sepatu,tas, dan lain-lain. Dikarenakan di lantai ke 3 dan 4 hingga sekarang pembangunannya belum selesai disebabkan karena penyumbatan dana



dari pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan klasifikasi tempat itu belum berjalan dengan Efektif dan Efisien.

Menurut Firdaus Ahmad Dunia Wasilah (2009 :5) mengemukakan bahwa Pengendalian merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus menerus antara pelaksanaan dengan rencana. Melalui proses membandingkan hasil yang sesungguhnya dengan program atau anggaran yang disusun, maka manajemen dapat melakukan penilaian atas efisiensi usaha dan kemampuan memperoleh laba dari berbagai produk. Di samping itu, para manajer dapat mengadakan tindakan koreksi jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang timbul dari hasil perbandingan tersebut.

#### **4. Hambatan- hambatan dalam pengelolaan Pasar Modern**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di peroleh informasi tentang penentuan klasifikasi tempat oleh perusahaan daerah dapat disimpulkan bahwa masih adanya hambatan-hambatan dalam pengelolaan Pasar Modern di Pasir Pengaraian, maka dapat ditarik benang merah bahwa Faktor-faktor penghambat penentuan klasifikasi tempat di Pasar Modern adalah kurangnya dana atau anggaran dari Pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan dilantai 3 sehingga tempat yang ingin ditentukan belum bisa sesuai dengan keinginan pedagang dan belum sesuai dengan rencana Perusahaan Daerah.

Selain itu faktor penghambat yang ditemukan melalui wawancara untuk menentukan klasifikasi tempat para pedagang yaitu kurang baiknya Komunikasi antara pedagang dan kariawan sehingga usulan dari pedagang yang mengusulkan

agar sesuai dengan penempatan tempat yang di inginkan belum terpenuhi atau terlaksanakan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengelolaan pasar modern oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang bertujuan agar menjadikan Pasar Modern sebagai pusat perbelanjaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar, menurut hasil analisis yang dilakukan penulis dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik terkait dengan pembangunan yang ada di lantai 3 dan 4 yang belum selesai sehingga membuat penataan tempat pedagang yang telah di rencanakan oleh perusahaan daerah belum terlaksanakan.
2. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan pasar modern oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yaitu belum tertatanya tempat pedagang dengan baik yang mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa pasar modern tersebut tidak di kelola sebaik mungkin, selain itu karena dana yang di keluarkan Pemerintah untuk pembangunan belum terpenuhi seperti untuk penyelesaian pembangunan di lantai 3 dan 4.

## **B. Saran**

Setelah melihat hasil dalam penelitian ini maka penulis memberikan saran yang dapat berguna untuk meningkatkan pengelolaan pasar Modern yang di lakukan oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya yaitu Sebaiknya Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya berinisiatif membuat inovasi-inovasi seperti mengutamakan pasar yang harus diperbaiki terlebih dahulu dan harus mempunyai skala prioritas apa saja yang harus dibenahi dan diperbaiki agar permasalahan di pasar Modern tersebut berkurang. Sehingga Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya mempunyai target dalam pembangunan Pasar Modern dan tidak hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Direktur Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya . Selain itu perencanaan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya seperti memberikan pelayanan yang prima, memberikan kenyamanan, keindahan, serta keamanan bagi masyarakat dan pedagang belum semuanya teralisasi dengan baik.

Dan saran penulis tetang pengorganisaian Sebaiknya Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya membudayakan kerja disiplin, meningkatkan etos kerja, bertanggung jawab sepenuhnya dengan perannya masing-masing sesuai tugas, pokok, dan fungsi yang telah diberikan dan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya. Sebaiknya menambah personil sesuai dengan kebutuhan agar permasalahan Pasar Modern di Pasir Pengaraian dapat berkurang.

Untuk pengendalian Sebaiknya Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya perlu malakukan tindak lanjut mengenai standar capaian, menilai pelaksanaan dan apabila ada permasalahan perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai

dengan apa yang telah digariskan apabila dalam pelaksanaan terdapat permasalahan maka sebaiknya Direktur Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya memberikan teguran atau sanksi terhadap para pegawai sehingga para pegawai menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah yang telah diberikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono. 2008. *Psikologi Belajar*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Adi Nugroho, 2004, *Analisis dan Perancangan Informasi dengan Metodologi Berorientasi Objek*, Bandung, Informatika Bandung.
- Adisasmia, Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Adi Nugroho, 2004. *Analisi dan Perencanaan Informasi dengan Metode Berorientasi Objek*, Informatika Bandung, Bandung.
- A. G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta , Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Azhar Susanto. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Gramedia
- Erly Suandy. 2001. *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Firdaus Ahmad & Wasilah. 2009. *Akuntansi Biaya*”, Salemba Empat : Jakarta
- George R. Terry, 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen. (edisi bahasa Indonesia)*, Bandung, PT. Bumi Aksara.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi Keempat, New Jersey*, Penerbit Universitas Diponegoro, International, Inc.
- G Subarsono, 2005. *Analisis kebijakan Publik Konsep. Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : pustaka pelajar
- Hanif Nurcholih, 2007 *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo.
- Handoko, T . Hani, 2008. *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua*, Yogyakarta, BPF.

Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara.

—————, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.

—————, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi revisi cetakan ke tiga belas). Jakarta: PT Bumi Aksara

J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosdakarya

Koryati, Nyimas Dwi, dkk, 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, Yogyakarta, YPAPI.

Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. 2014. *Perilaku Organisasi. Edisi 9. Buku 1*. Jakarta, Salemba Empat.

Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta, Kencana.

Labolo, Muhadam. 2011. *Kepemimpinan Bahar, Sebuah Alternatif Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Mathis, R.L. and Jackson J.H. 2008. *Human resource management*, 12th ed. Mason, Ohio: Thomson South Western.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Nanang Fattah. 2007. *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu 2010. *Metologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta.

—————, 2011. *Kybernology ( Ilmu Pemerintahan Baru )*. Jakarta, Rineka Cipta.

- Patton, M.Q. (2001). *Qualitative Research and evaluation methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Rasyid, Ryaas, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, BPFE.
- Robbins, S.P dan Judge T.A. 2015. *Perilaku Organisasi*. Jakarta, Salemba Empat.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Penerbit Djambatan.
- Siagian, Sondang., P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Pertama). Jakarta: Binapura Aksara.
- Sjamsulbachri. 2004. *Karakteristik Perencanaan Strategi Belajar Mengajar Akuntansi di SMA dan SMK*. Bandung: Kencana Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Soekartawi. 2000. *Pengantar Agroindustri*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Syafie Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Refika Aditama.
- , 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Rafika Aditama.
- , 2011. *Etika Pemerintahan*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Uno, Hamzah.2006. *Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Untoro dan Halim, 2007. *Akuntansi sector Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.



## **Dokumen**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar Modern.

